

PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

HANDOKO NUGROHO Y

ABSTRAK

Banyak negara yang merespon positif dan melegalkan penyelenggaraan telemedicine di negara mereka. Hal ini karena telemedicine memberikan keuntungan dan merupakan solusi dari pelayanan kesehatan yang terpisahkan oleh jarak. Belum adanya peraturan hukum tentang pelayanan kesehatan telemedicine, kondisi ini dapat menjadi sumber sengketa hukum, terlebih apabila dibarengi dengan kurangnya pengaturan dan kepastian hukum, maka hukum akan semakin sulit ditegakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative.

Masalah hukum yang mungkin timbul meliputi perizinan, privasi pasien dan kerahasiaan catatan medis elektronik, kebijakan dan prosedur klinis. Sebagian besar aplikasi online untuk layanan kesehatan dibuat oleh profesional non-medis. Pemerintah bersama penyedia layanan dan masyarakat perlu untuk menetapkan standar nasional dan pedoman penggunaan telemedicine untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, berkualitas tinggi, adil dan tidak diskriminatif.

Telemedicine telah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun hendaknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter dan pasien. Sampai saat ini, belum ada pengaturan rinci tentang pelayanan kesehatan online baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan etika profesi kedokteran. Sudah saatnya regulasi layanan telemedicine dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum baik bagi praktisi kesehatan maupun pengguna layanan kesehatan.

Dikarenakan belum terdapat aturan hukum kesehatan secara khusus yang mengatur pemberian layanan telemedicine, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

Kata Kunci : Telemedicine, Kepastian Hukum, Pengaturan dan Pertanggung Jawaban Hukum

REGULATION AND LEGAL ACCOUNTABILITY OF TELEMEDICINE IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY

HANDOKO NUGROHO Y

ABSTRACT

Many countries have responded positively and legalized telemedicine in their countries. This is because telemedicine provides benefits and is a solution for health services that are separated by distance. There is no legal regulation regarding telemedicine health services, this condition can be a source of legal disputes, especially when accompanied by a lack of regulation and legal certainty, the law will be increasingly difficult to enforce. This study uses a normative legal research approach.

Legal issues that may arise include licensing, patient privacy and confidentiality of electronic medical records, clinical policies and procedures. Most online applications for healthcare are made by non-medical professionals. The government together with service providers and the public need to establish national standards and guidelines for the use of telemedicine to provide responsible, safe, high quality, fair and non-discriminatory health services.

Telemedicine has provided an opportunity to carry out medical practices that are free from distance restrictions, but should not be directed to replace face-to-face interactions between doctors and patients. Until now, there has been no detailed regulation regarding online health services, both in laws and regulations and in the provisions of medical professional ethics. It is time for regulations on telemedicine services to be included in national laws and regulations to meet the needs of technological developments and provide legal certainty for both health practitioners and users of health services.

Because there are no health law rules that specifically regulate the provision of telemedicine services, parties who commit violations can be held accountable both civilly, criminally and administratively.

Keywords : Telemedicine, Legal Certainty, Regulation and Accountability Law